

# PENGARUH PENGANGGURAN, BELANJA PEMERINTAH, DAN IPM TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Herwin Simbolon<sup>1</sup>; Muhammad Rachmad R<sup>2</sup>; Dwi Hastuti<sup>3</sup>

Universitas Jambi

Jln. Raya Jambi – Ma. Bulian KM 15, Mendalo Darat Telp. (0741) 583317

E-mail : [herwinsimbolon84@gmail.com](mailto:herwinsimbolon84@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to analyze the effects of the open unemployment rate (OUR), government spending (GS), and the human development index (HDI) on poverty rates in 11 regencies/cities in Jambi Province for the period 2020–2024, as well as to formulate poverty alleviation strategies through PESTEL analysis. The method used is panel data regression with the Fixed Effects Model (FEM). The results show that the OUR has no significant effect on poverty (prob. 0.7392), while GG and HDI have negative and significant effects on poverty with probabilities of 0.0133 and 0.0005, respectively. The model explains 98,89% of the variation in poverty across districts/cities. The PESTEL analysis identifies six poverty alleviation strategies: strengthening governance, economic diversification, improving human resource quality, digital transformation, strengthening environmental resilience, and legal certainty.

**Keywords:** *Poverty, Unemployment, Government Expenditure, HDI, Panel Data Regression, PESTEL*

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang mesti dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang (Banito & Rachmad, 2022), juga terkadang bisa jadi masalah multidimensional yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama pembangunan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga layanan dasar lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,9 juta jiwa atau sekitar 9,36 persen dari total populasi.

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di Sumatera memiliki karakteristik ekonomi yang bertumpu pada sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Meski kaya akan potensi sumber daya alam,

kondisi kemiskinan di Jambi masih ada menunjukkan fluktuasi yang perlu dikaji lebih mendalam. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, tingkat kemiskinan sempat meningkat dari 7,58% pada tahun 2020

menjadi 8,09% pada tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 7,26% pada tahun 2024.

**Tabel 1. Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Belanja Pemerintah, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024**

| Tahun            | TK (%) | TPT (%) | BP (Rp)       | IPM (%) |
|------------------|--------|---------|---------------|---------|
| 2020             | 7,58   | 5,13    | 4.430.392.751 | 72,29   |
| 2021             | 8,09   | 5,09    | 4.516.148.844 | 72,62   |
| 2022             | 7,62   | 4,59    | 4.772.689.354 | 73,11   |
| 2023             | 7,58   | 4,53    | 5.175.212.402 | 73,73   |
| 2024             | 7,26   | 4,48    | 4.739.450.000 | 74,36   |
| <b>Rata-Rata</b> | 7,62   | 4,76    | 4.726.778.670 | 73,22   |

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Tiga faktor utama dalam penelitian ini yang memengaruhi kemiskinan di Provinsi Jambi adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), belanja pemerintah, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Meskipun TPT Jambi menunjukkan tren penurunan dari 5,13% (2020) menjadi 4,48% (2024), penurunan

tersebut tidak selalu sejalan dengan perubahan angka kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan kerja formal, tetapi juga kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja (Sari & Falianto, 2020).

Dari sisi fiskal, belanja pemerintah mengalami peningkatan dari Rp4,43 miliar pada 2020 hingga mencapai puncaknya Rp5,17 miliar pada 2023, sebelum sedikit menurun pada 2024, dengan rata-rata sebesar Rp4,73 miliar. Belanja pemerintah merupakan instrumen krusial dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Menurut Teori Keynesian, peningkatan belanja pemerintah pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan (Hermawan, 2020). Di sisi lain, naik turunnya persentase IPM dipengaruhi oleh kemiskinan (Rachmad, 2021). IPM menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 72,29 menjadi 74,36, dengan rata-rata 73,222, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat. IPM mencerminkan kualitas modal manusia yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kemampuan individu untuk keluar dari jerat kemiskinan. Menurut Becker (1964), teori Kapital Manusia berpendapat bahwa produktivitas tenaga kerja akan meningkat jika pendidikan dan kesehatan lebih baik, sehingga kemiskinan akan ditekan (Admaja, Rahmad Dwi, 2023)

Pada penelitian ini mengintegrasikan analisis regresi data panel dengan analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Legal). Pendekatan ganda ini memungkinkan karena penjelasan tidak hanya tentang besarnya pengaruh variabel ekonomi secara statistik, tetapi juga pemahaman kontekstual tentang mengapa dinamika kemiskinan tersebut terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh TPT, belanja pemerintah, dan IPM terhadap tingkat

kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2020–2024; dan (2) merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi berdasarkan analisis PESTEL.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Provinsi Jambi dalam angka, dan berbagai publikasi resmi lainnya. Data panel mencakup 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024, sehingga menghasilkan 55 observasi (11 unit × 5 tahun). Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (TK) dalam persen, dan tiga variabel independen yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X1) dalam persen, Belanja Pemerintah (BP) (X2) dalam rupiah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3) dalam persen.

## HASIL

**Tabel 2. Hasil Uji fixed Effect Model**

| Variabl e | Coefficien t | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|-----------|--------------|------------|-------------|--------|
| C         | 15.25813     | 2.802990   | 5.443519    | 0.0000 |
| TPT (X1)  | 0.003669     | 0.010946   | 0.335188    | 0.7392 |
| BP (X2)   | -0.217366    | 0.084041   | -2.586435   | 0.0133 |
| IPM (X3)  | -2.043168    | 0.542345   | -3.767285   | 0.0005 |

Sumber: Olah Data EViews 12, 2026

Berdasarkan Tabel 1, persamaan regresi yang dihasilkan adalah  $TK = 15.25813 + 0.003669TPT - 0.217366BP - 2.043168IPM$ . Nilai konstanta sebesar 15.25813 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi diperkirakan sebesar 15.258 persen.

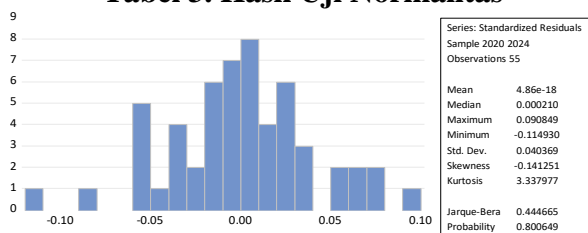
## Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji Chow, Hausman, dan LM, model yang terbaik

dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS)., untuk memastikan validitas model, Maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelas.

**Uji Normalitas**

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Olah Data EViews 12, 2025

Berdasarkan output Eviews 12 dari uji normalitas maka diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,800649 > 0,05, sehingga residual model terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

**Uji Multikoninealitas**

**Tabel 4. Hasil Uji Multikoninealitas**

|     | TPT      | BP       | IPM      |
|-----|----------|----------|----------|
| TPT | 1        | 0.459523 | 0.659601 |
| BP  | 0.459523 | 1        | 0.041921 |
| IPM | 0.659601 | 0.041921 | 1        |

Sumber: Olah Data EViews 12, 2026

Nilai kolerasi X1 dan X2 adalah 0,45 < 0,80, Kolerasi X1 dan X3 adalah 0,66 < 0,80, Kolerasi X2 dan X3 adalah 0,41 < 0,80. Maka dapat disimpulkan bahwa variable independent ini terbebas dari uji multikolinearitas.

**Uji Heteroskedasitas**

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedasitas**

| Variabl e | Coefficie nt | Std. Error | t- Statisti c | Prob.  |
|-----------|--------------|------------|---------------|--------|
| C         | 1.980834     | 1.213277   | 1.632632      | 0.1102 |
| TPT       | 0.001124     | 0.004738   | 0.237283      | 0.8136 |
| BP        | -0.017449    | 0.036377   | -0.479668     | 0.6340 |

|     |           |          |           |        |
|-----|-----------|----------|-----------|--------|
| IPM | -0.370496 | 0.234755 | -1.578226 | 0.1222 |
|-----|-----------|----------|-----------|--------|

Sumber: Olah Data EViews 12, 2026

Berdasarkan output Eviews 12, diperoleh bahwa Uji heteroskedastisitas metode Glejser menunjukkan seluruh nilai probabilitas variabel independen > 0,05, berarti model bebas dari heteroskedastisitas.

**Uji Autokolerasi**

**Tabel 6. Hasil Uji Autokolerasi**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Durbin-Watson Stat | 2,126908 |
|--------------------|----------|

Sumber: Olah Data Eviews 12

Uji autokorelasi Durbin-Watson menghasilkan nilai 2,126908, berada di antara DU (1,6815) dan 4-DL (2,5477), artinya tidak terdapat autokorelasi.

**Uji Statistik**

**Tabel 7. Rekapitulasi Uji t, Uji F, dan R-Squared**

| Uji         | Statistik           | Nilai     | Prob./Ket.          |
|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Uji t – TPT | t-hitung            | 0,335188  | 0.7392 (Tdk Sig.)   |
| Uji t – BP  | t-hitung            | -2,586435 | 0.0133 (Signifikan) |
| Uji t – IPM | t-hitung            | -3,767285 | 0.0005 (Signifikan) |
| Uji F       | F-hitung            | 280,1104  | 0.0000 (Signifikan) |
| R-Squared   | Adj. R <sup>2</sup> | 0,988866  | 1,1134%             |

Sumber: Olah Data EViews 12, 2025

Uji F menghasilkan F-hitung sebesar 280,1104 (> F-tabel 2,00664) dengan probabilitas 0,000000 (< 0,05). Artinya, secara simultan TPT, BP, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,988866 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 98,8866% variasi kemiskinan antarkabupaten/kota di Provinsi Jambi, sedangkan sisanya sebesar 1,1134% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Hasil Analisis PESTEL**

Analisis PESTEL mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang membentuk dinamika kemiskinan di Provinsi Jambi dari

enam dimensi. Dari sisi Politik, stabilitas pasca-pilkada serentak 2024 membuka peluang konsolidasi kebijakan (Dialektikajambi, 2024). Namun, temuan BPK RI (2024) mengungkap lemahnya koordinasi antarinstansi dan pengawasan anggaran di beberapa kabupaten, termasuk Muaro Jambi, yang menghambat efektivitas program penanggulangan kemiskinan (Monitor Indonesia, 2025).

Dari sisi Ekonomi, PDRB Provinsi Jambi 2024 mencapai Rp322,98 triliun dengan pertumbuhan 4,51%, namun masih sangat bergantung pada sektor primer: pertanian (33,93%), perdagangan (13,29%), dan pertambangan (13,41%) (BPS Provinsi Jambi, 2025). Ketergantungan ini menjadikan perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, yang menjelaskan mengapa penurunan TPT yang cukup signifikan tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan.

Dari sisi Sosial, IPM Provinsi Jambi 2024 mencapai 74,36 dengan disparitas lebar antarkabupaten yang tertinggi di Kota Jambi (81,77) dan terendah di Tanjung Jabung Timur (70,77) (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,74 tahun masih di bawah standar wajib belajar sembilan tahun, dan Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 71,93 tahun masih di bawah rata-rata nasional 73,25 tahun (Pariwarajambi, 2025), mencerminkan keterbatasan kualitas modal manusia yang berkontribusi pada kemiskinan struktural.

Dari sisi Teknologi, penetrasi internet nasional mencapai 79,5% pada 2024, namun kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan di Jambi masih besar. Tingkat inklusi keuangan nasional baru mencapai 75,02% (OJK, 2024), sementara kondisi riil di pedesaan Jambi diperkirakan lebih rendah, membatasi akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan produktif (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2025).

Dari sisi Lingkungan, Provinsi Jambi menghadapi tekanan bencana hidrometeorologi yang berulang (BNBP, 2025). Dampak El Niño pada awal 2024 memicu banjir di hampir seluruh wilayah

Jambi, memperlambat pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 menjadi hanya 3,83%. Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk miskin sangat rentan terhadap gangguan iklim ini. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta degradasi gambut memperparah kondisi tersebut (BPBD, 2024)

Dari sisi Hukum, banyak masyarakat miskin di Jambi, terutama petani dan komunitas Suku Anak Dalam (SAD), tidak memiliki sertifikat tanah formal, sehingga tidak dapat mengakses kredit produktif. Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) secara nasional telah mencapai 83% di Kanwil ATR/BPN Jambi (AntaraNews, 2025), namun belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil dan kawasan adat.

## PEMBAHASAN

Hasil uji t menunjukkan bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi ( $t$ -hitung  $0,335 < t$ -tabel  $2,018$ ; prob.  $0,739$ ). Temuan ini berbeda dari hipotesis awal yang didasarkan pada teori Hukum Okun, namun dapat dijelaskan oleh dominasi sektor informal dalam struktur perekonomian Jambi. Masyarakat yang secara formal termasuk kategori penganggur terbuka masih dapat bertahan melalui pertanian subsisten, perkebunan karet dan kelapa sawit keluarga, atau usaha mandiri di sektor informal, sehingga tidak serta merta masuk dalam kategori miskin.

Temuan ini konsisten dengan penelitian (Fattah et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa dalam perekonomian daerah dengan dominasi sektor pertanian dan informal, hubungan antara pengangguran terbuka dan kemiskinan tidak selalu bersifat linier dan signifikan. Data TPT Provinsi Jambi yang secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional (4,5% dengan 6,8% pada Februari 2024) juga tidak mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya, karena angka tersebut tidak menangkap fenomena kemiskinan pekerja (*working poor*) di sektor informal.

Belanja pemerintah terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan ( $t$ -hitung 2.586 >  $t$ -tabel 2,018; prob. 0,0133), dengan koefisien -0,217. Artinya, setiap peningkatan belanja pemerintah sebesar Rp1 miliar akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,217 persen. Meski koefisien tampak kecil secara numerik, dampaknya terasa nyata dalam konteks anggaran daerah yang besar, peningkatan realisasi belanja dari Rp4,43 triliun (2020) menjadi Rp5,17 triliun (2023) terbukti berkontribusi pada penurunan kemiskinan dari 8,09% (2021) menjadi 7,26% (2024).

Temuan ini konsisten dengan Teori Keynesian yang menegaskan adanya efek pengganda (*multiplier effect*) dari belanja publik. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran pada sektor produktif, permintaan agregat naik, lapangan kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat terdorong. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Sitanggang et al., 2024) di Provinsi Sumatera Utara dan (Putri et al., 2021) di Provinsi Jambi. Penurunan realisasi belanja pada 2024 menjadi Rp4,74 triliun menjadi catatan penting, karena dapat melemahkan daya dorong fiskal terhadap pengentasan kemiskinan, terutama di kabupaten dengan kemiskinan di atas rata-rata provinsi.

IPM merupakan variabel dengan pengaruh paling dominan dan signifikan ( $t$ -hitung 3,767 >  $t$ -tabel 2,018; prob. 0,0005; koefisien -2.043). Setiap peningkatan IPM sebesar 1 poin akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2.043 persen. Temuan ini sangat sejalan dengan *Human Capital Theory* (Becker, 1964) yang menyatakan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas individu, memungkinkan mereka memperoleh pendapatan lebih tinggi dan keluar dari jerat kemiskinan.

Tren peningkatan IPM dari 72,29 (2020) menjadi 74,36 (2024) secara konsisten berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Namun, disparitas IPM yang lebar antarkabupaten selisih 11 poin antara Kota Jambi (81,77) dan Tanjung Jabung Timur

(70,77) mencerminkan ketimpangan pembangunan manusia yang menjadi akar kemiskinan di pedesaan Jambi. Temuan ini didukung oleh penelitian (Nurafni et al., 2021) yang semuanya menyimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Integrasi hasil regresi dan analisis PESTEL menghasilkan enam strategi utama yang saling berkaitan. Pertama, penguatan tata kelola dan konsolidasi kebijakan perlindungan sosial. Temuan bahwa belanja pemerintah signifikan menekan kemiskinan harus diimbangi dengan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, mengingat temuan BPK RI (2024) tentang lemahnya pengawasan program kemiskinan di beberapa kabupaten. Langkah konkret meliputi penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan target kinerja terukur dan sistem informasi manajemen terintegrasi. Kedua, diversifikasi ekonomi dan perluasan lapangan kerja berkualitas.

Ketergantungan tinggi pada sektor primer yang menjelaskan tidak signifikannya TPT terhadap kemiskinan harus diatasi melalui hilirisasi produk unggulan (sawit, karet, kayu manis), pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, dan penguatan ekosistem UMKM dengan akses permodalan dan pasar digital. Ketiga, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan. Mengingat IPM adalah variabel paling berpengaruh, prioritas anggaran untuk pendidikan dan Kesehatan, terutama di kabupaten IPM rendah menjadi sangat strategis. Program beasiswa keluarga miskin, vokasi berbasis industri lokal, dan perluasan jangkauan Puskesmas di daerah terpencil perlu diperkuat. Keempat, percepatan transformasi digital dan inklusi keuangan. Kelima, penguatan ketahanan lingkungan melalui sistem peringatan dini, restorasi gambut, dan asuransi pertanian. Keenam, penguatan kepastian hukum melalui percepatan PTSL dan perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan komunitas adat.

## SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, dari analisis regresi data panel *Fixed Effect Model* periode 2020–2024 pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, terbukti bahwa: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan akibat dominasi sektor informal dan pertanian subsisten yang menjadi penyangga; (b) Belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan, mengkonfirmasi efek pengganda fiskal Keynesian; dan (c) IPM merupakan variabel penjelas paling dominan dengan pengaruh negatif signifikan, membuktikan relevansi *Human Capital Theory*. Secara bersama, ketiga variabel mampu menjelaskan 98,89% variasi kemiskinan antarkabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Kedua, analisis PESTEL mengidentifikasi dinamika kemiskinan yang bersifat multidimensional dan tidak dapat diatasi hanya melalui satu pendekatan. Enam strategi penanggulangan yang direkomendasikan yakni penguatan tata kelola, diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, transformasi digital, ketahanan lingkungan, dan kepastian hukum harus berjalan secara sinergis dan terencana. Dalam jangka pendek, fokus pada tata kelola dan ketepatan sasaran bansos. Jangka menengah, diversifikasi ekonomi dan pemerataan infrastruktur. Jangka panjang, ketahanan lingkungan dan kepastian hukum. Dengan langkah terencana dan konsisten, target penurunan kemiskinan Jambi di bawah 5,78% sesuai RPJMN 2025–2029 dapat dicapai (Diskominfo, 2024).

## DAFTAR RUJUKAN

Admaja, Rahmad Dwi, M. I. H. (2023). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Harapan Hidup, Tingkat Harapan Lama Sekolah dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 6(1), 126–131.

AntaraNews. (2025). Program PTSL Kanwil ATR/BPN Jambi capai 83 persen. Antara News.

- <https://jambi.antaranews.com/berita/629493/program-ptsl-kanwil-atr-bpn-jambi-capai-83-persen>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Tahun 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 62.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2025). Analisis Kondisi Kemiskinan Provinsi Jambi 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 08, 104.
- Banito, F. R., & Rachmad, M. R. (2022). Determinan kemiskinan di Provinsi Jambi. 17(1), 189–198.
- BNBP. (2025). Data Bencana Indonesia 2024. Pusat Data Informasi Dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 3, 167.
- BPBD. (2024). Karhutla di Jambi capai ratusan hektar. BPBD. <https://minanews.net/bpbd-karhutla-di-jambi-hingga-768-hektar/>
- BPS Provinsi Jambi. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan IV-2024. 11.
- Dialektikajambi. (2024). Pelaksanaan Pilkada Serentak Se-Provinsi Jambi Berlangsung Lancar. Dialektikajambi.Com. <https://www.dialektikajambi.com/2024/11/pelaksanaan-pilkada-serentak-se.html>
- Diskominfo, P. J. (2024). Data Talk: Kemiskinan Di Provinsi Jambi. Diskominfo Provinsi Jambi. [https://diskominfo.jambiprov.go.id/berita/berita\\_detail/342](https://diskominfo.jambiprov.go.id/berita/berita_detail/342)
- Fattah, S., Razak, A. R., & Yusuf, M. A. (2025). Econometric Modelling of the Rural Poverty, Unemployment and the Agricultural Sector Using a Truncated Spline Approach with Longitudinal Data. 1–23.
- Hermawan, W. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat Untuk Fungsi Lingkungan Hidup Terhadap

- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 6. <https://doi.org/10.24114/qej.v6i1.17533>
- Monitor Indonesia. (2025). Lamban, Penanggulangan Kemiskinan di Muarojambi. *Monitor Indonesia*. <https://monitorindonesia.com/nusantara/read/2025/08/612383/lamban-penanggulangan-kemiskinan-di-muarojambi>
- Nurafni, H., Rachmad, M. R., & Safri, M. (2021). Analisis determinan kemiskinan dan hubungannya dengan program pengentasannya Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. *16(4)*, 689–704.
- OJK. (2024). Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028. OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Peta-Jalan-Pengembangan-dan-Penguatan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Kuangan.-Aset-Kuangan-Digital-dan-Aset-Kripto-2024-2028.aspx>
- Pariwarajambi. (2025). Mengurai Ketimpangan, Menggapai Harapan: Potret IPM Jambi. *Pariwarajambi.Com*. <https://www.pariwarajambi.com/2025/09/mengurai-ketimpangan-menggapai-harapan-potret-ipm-jambi.html>
- Putri, R. A., Zamzami, Z., & Rahmadi, S. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 107–122. <https://doi.org/10.22437/pdpe.v10i2.12858>
- Rachmad, M. R. (2021). Faktor penentu indeks pembangunan manusia dan hubungannya dengan belanja infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota Provinsi Jambi. *16(2)*, 343–358.
- Sari, Y., & Falianto, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 8(2), 103–113. <https://doi.org/10.53978/jd.v8i2.154>
- Sitanggang, D. M., Siburian, E. S., Tobing, M. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Sumatera Utara (Tahun 2001-2021). *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 91–97. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1589>
- TatvitaAnalysts. (2025). Transforming Poverty in South Sudan to achieve SDG1 through PESTEL Analysis. *Tatvita Analysts*. <https://tatvita-analysts.com/2025/06/25/transforming-poverty-in-south-sudan-to-achieve-sdg1-through-pestel-analysis/>